

ABSTRAK

Masalah penelitian ini adalah kurang efektifnya pelaksanaan total sanksi PPh pasal 21 pada KPP PRATAMA Sumedang sebab itu, penelitian ini di arahkan pada peranan sanksi PPh pasal 21 terhadap meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan PPh Pasal 21 KPP PRATAMA SUMEDANG.

Penelitian menggunakan metode survei; sedangkan data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan regresi dan corelation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Total sanksi PPh pasal 21 menunjukan bahwa variabel bebas berupa Total Sanksi PPh Pasal 21 berperan kuat dan signifikan terhadap variabel terikat berupa Total Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 pada Kabupaten Sumedang. Dengan demikian $t_{hitung} (6.137 > t_{tabel} (2.228))$, sehingga jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima. Peranan tersebut dinilai cukup besar.
2. Total sanksi PPh pasal 21 pada uji determinasi sebesar 82,5% keragaman variabel Total Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 disebabkan oleh keragaman Total Sanksi PPh Pasal 21, sedangkan sisanya sebanyak 17,5 % disebabkan oleh faktor lain
3. Hasil nilai alpha peranan Total sanksi PPh pasal 21 terhadap Total Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 0,651 dinilai cukup besar

Berdasarkan hal di atas, Total sanksi PPh pasal 21 perlu ditingkatkan kualitasnya antara lain melalui penataan mekanisme pelaksanaan tugas pegawai, melengkapi sarana kerja pegawai dan meningkatkan penumbuhan kreativitas pegawai dalam memperbaiki pelaksanaan tugasnya. Selain itu, perlu peningkatan kualitas Total sanksi PPh pasal 21 terhadap Total Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 melalui antara lain meningkatkan persahabatan dengan pegawai, mengakui keberhasilan tugas pegawai dan meningkatkan kesejahteraannya.

DAFTAR ISI

	Hlm
ASBTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	5
1.6 Metode Penelitian	7
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sejarah Perpajakan	10
2.1.1 Definisi Perpajakan	11
2.1.2 Fungsi Pajak	13
2.1.3 Teori Pembetulan Pemungutan Pajak	13
2.1.4 Jenis Pajak	15
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	17
2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	18
2.1.7 Tarif Pajak	19
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	23
2.2.1 Pemotong PPh 21	24
2.2.2 Wajib Pajak PPh 21	25
2.2.3 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh 21	27
2.2.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh 21	27

2.2.5	Objek PPh 21; Objek PPh 21 Final; Bukan Obek PPh 21 Objek PPh 21	29
2.2.6	Tata Cara penghitungan PPh 21	32
2.2.7	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486 / KMK.03 / 2003 Tentang “Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan	34
2.3	Sanksi Perpajakan	39
 BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Objek Penelitian	46
3.1.1	Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak PRATAMA SUMEDANG	46
3.1.2	Struktur Organisasi dan Tugas Setiap Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak KPP PRATAMA SUMEDANG	48
3.2	Metode penelitian	52
3.2.1	Penetapan Variabel Penelitian	52
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	52
3.2.3	Analisa Pengujian Hipotesis	53
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Surat Ketetapan Pajak	56
4.1.1	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ...	56
4.1.2	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	57
4.1.3	Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB)	59
4.1.4	Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)	60
4.1.5	Surat Tagihan Pajak (STP)	60
4.2	Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak Dasar Hukum	61

4.3 Penerapan Sanksi Perpajakan	71
4.4 Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Perpajakan	77
4.5 Langkah – Langkah Yang Harus Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Penerapan Sanksi	77
4.6 Analisa Pengujian Hipotesis	78
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	83

DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 2.1 Tarif Tetap	20
Tabel 2.2 Tarif Proporsional	20
Tabel 2.3 Pengenaan Pajak tetap	21
Tabel 2.4 Penggunaan Pajak Meningkat	22
Tabel 2.5 Pengenaan Pajak Dasar	22
Tabel 2.6 Pengenaan Pajak Dasar Menurun	23
Tabel 2.7 Pengenaan Pajak Semakin Menurun	23
Tabel 2.8 Penghasilan Bruto	32
Tabel 2.9 Tarif Pajak Pasal 17	33
Tabel 2.10 Sanksi berupa % Bunga 2	40
Tabel 2.11 Sanksi berupa denda administrasi	41
Tabel 2.12 Sanksi administrasi berupa kenaikan 50 % dan 100 %	41
Tabel 2.13 Sanksi kepada Wajib Pajak	42
Tabel 2.14 Sanksi kepada Pejabat Pajak	44
Tabel 2.15 Sanksi kepada Pihak Ketiga	44
Tabel 3.1 Jenis-jenis KPP	47
Tabel 4.1 Sanksi berupa Bunga 2 %	72
Tabel 4.2 Sanksi berupa denda administrasi	73
Tabel 4.3 Sanksi administrasi berupa kenaikan 50 % dan 100 %	74
Tabel 4.4 Sanksi kepada Wajib Pajak	75
Tabel 4.5 Sanksi kepada Pejabat Pajak	76
Tabel 4.6 Sanksi kepada Pihak Ketiga	77
Tabel 4.7 Total Sanksi PPh Pasal 21 (Sep 2007 – Juni 2008)	78
Tabel 4.8 Total Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 (Sep 2007 – Juni 2008)	79
Tabel 4.9 Rekapitulasi Sanksi Dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 (Sep 2007 – Juni 2008)	79
Tabel 4.10 Correlations	80
Tabel 4.11 Coefficients(a)	80
Tabel 4.12 Model Summary(b)	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Nonparametric Correlations
Lampiran 2	Uji Regresi Total Sanksi PPh Pasal 21 terhadap Total Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21
Lampiran 3	Reliability Scale: ALL VARIABLES
Lampiran 4	Data Hasil Laporan dari Dinas Pajak Kabupaten Sumedang
Lampiran 5	Struktur Organisasi KPP Pratama Sumedang.....
Lampiran 6	Wilayah kerja I dan II dari KPP PratamaSumedang.....
Lampiran 7	Lembar penghitungan PPh Pasal 21.....
Lampiran 8	Nota penghitungan Pajak Penghasilan.....
Lampiran 9	SPT Masa PPh Pasal 21.....
Lamp 10	SSP Lembar 1 – 5.....
Lamp 11	Bukti pemotongan PPh Pasal 21 Tidak Final.....
Lamp 12	Bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final.....
Lamp 13	Lembar pengawasan arus dokumen.....
Lamp 14	Bukti penerimaan surat.....